

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1. Review Hasil-hasil Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian yang pernah dilakukan untuk meneliti faktor-faktor yang mempengaruhi audit delay, adalah sebagai berikut :

Penelitian Pertama dilakukan oleh Saemargani dan Mustikawati (2015), Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif, yaitu penelitian yang analisisnya lebih fokus pada data numerik yang diolah menggunakan metode statistika. Penelitian ini menggunakan data sekunder dalam bentuk laporan keuangan dengan menggunakan teknik purposive sampling, metode pengumpulan data menggunakan metode dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ukuran perusahaan tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap audit delay, umur perusahaan berpengaruh signifikan terhadap audit delay, profitabilitas berpengaruh positif signifikan terhadap audit delay, solvabilitas tidak berpengaruh signifikan terhadap audit delay, ukuran KAP tidak berpengaruh signifikan terhadap audit delay dan opini auditor tidak berpengaruh signifikan terhadap audit delay.

Penelitian kedua dilakukan oleh Amani (2016) menyatakan bahwa:

- a. Ukuran Perusahaan berpengaruh secara signifikan terhadap Audit Delay pada perusahaan property dan real estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2012-2014. Hal ini ditunjukkan dengan koefisien regresi = -3,118, nilai signifikan t terbesar 0.010 yang lebih kecil dari 0,05. Dari hasil analisis data diperoleh R Square (R²) sebesar 0,053 yang berarti Audit Delay pada perusahaan property dan real estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2012-2014 dipengaruhi oleh Ukuran Perusahaan sebesar 5,3%.

- b. Profitabilitas berpengaruh secara signifikan terhadap Audit Delay pada perusahaan property dan real estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2012-2014. Hal ini ditunjukkan dengan koefisien regresi= -22,386, nilai signifikansi t sebesar 0,026 yang lebih kecil dari 0,05. Dari hasil analisis data diperoleh R Square (R²) sebesar 0,040 yang berarti Audit Delay pada perusahaan property dan real estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2012-2014 dipengaruhi oleh Profitabilitas sebesar 4%.
- c. Opini Audit berpengaruh secara signifikan terhadap Audit Delay pada perusahaan property dan real estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2012-2014. Hal ini ditunjukkan dengan koefisien regresi= 3,407, nilai signifikansi t sebesar 0,013 yang lebih kecil dari 0,05. Dari hasil analisis data diperoleh R Square (R²) sebesar 0,050 yang berarti Audit Delay pada perusahaan property dan real estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2012-2014 dipengaruhi oleh Opini Audit sebesar 5%.
- d. Umur Perusahaan berpengaruh secara signifikan terhadap Audit Delay pada perusahaan property dan real estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2012-2014. Hal ini ditunjukkan dengan koefisien regresi= -0,231, nilai signifikansi t sebesar 0,038 yang lebih kecil dari 0,05. Dari hasil analisis data diperoleh R Square (R²) sebesar 0,038 yang berarti Audit Delay pada perusahaan property dan real estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2012-2014 dipengaruhi oleh Umur Perusahaan sebesar 3,8%.
- e. Terdapat pengaruh Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, Opini Audit dan Umur Perusahaan secara simultan terhadap Audit Delay pada perusahaan property dan real estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2012-2014. Hal ini ditunjukkan oleh sig sebesar 0,002 yang lebih kecil dari 0,05. Dari hasil analisis data diperoleh R Square (R²) sebesar 0,129 yang berarti Audit Delay pada perusahaan property dan real estate yang terdaftar di Bursa

Efek Indonesia pada tahun 2012-2014 dipengaruhi secara simultan oleh Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, Opini Audit dan Umur Perusahaan sebesar 12,9%.

Penelitian ketiga dilakukan oleh Ibrahim dan Suryaningsih (2016:1-21). Dalam penelitian ini objek yang diteliti adalah perusahaan infrastruktur, utilitas dan transportasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2012-2014. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah purposive sampling. Terdapat 24 perusahaan yang memenuhi kriteria yang telah ditetapkan peneliti. Hasil penelitian tersebut menyebutkan bahwa hanya Profitabilitas yang berpengaruh terhadap Audit Delay, sedangkan Leverage, Reputasi KAP dan Opini Audit tidak berpengaruh terhadap Audit Delay.

Penelitian keempat dilakukan oleh Mahendra dan Widhiyani (2017), penelitian ini menggunakan sumber data sekunder yang diperoleh dari situs www.idx.co.id. Sampel dalam penelitian ini menggunakan metode purposive sampling, metode pengumpulan data dilakukan dengan metode dokumenter. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dewan Komisaris berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap audit delay, Komite audit berpengaruh positif dan signifikan terhadap audit delay, Rapat Komite audit berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap audit delay, Opini auditor berpengaruh positif dan signifikan terhadap audit delay dan Internal auditor berpengaruh positif dan tidak signifikan.

Penelitian kelima dilakukan oleh Suparsada dan Putri (2017): 60-87. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif yang berbentuk asosiatif. Lokasi penelitian ini adalah di perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2012-2014. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, populasi penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2012-2014. Proses penentuan sampel menggunakan metode purposive sampling. Populasi perusahaan manufaktur periode 2012-2014 sebanyak 141 perusahaan, sedangkan yang memenuhi kriteria purposive

sampling untuk menjadi sampel adalah sejumlah 108. Hasil yang didapat yaitu Profitabilitas, Ukuran Perusahaan dan Kepemilikan Institusional berpengaruh negatif terhadap Audit Delay, sedangkan Reputasi Auditor berpengaruh positif terhadap Audit Delay.

Penelitian keenam dilakukan oleh Eksandi (2017), meneliti tentang “Pengaruh Ukuran Perusahaan, Solvabilitas, Profitabilitas, Komite Audit terhadap Audit Delay”. Sampel yang digunakan adalah purposive sampling, sampel untuk penelitian ini adalah perusahaan subsektor properti dan real estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2012-2015. Dari hasil pemilihan sampel dengan menggunakan metode purposive sampling terpilih 9 perusahaan yang memenuhi kriteria dari total populasi sebanyak 49 perusahaan. Hasil penelitian tersebut adalah bahwa hanya Profitabilitas dan Komite Audit yang berpengaruh terhadap Audit Delay, sedangkan Ukuran Perusahaan dan Ukuran Solvabilitas tidak berpengaruh terhadap Audit Delay.

Penelitian ketujuh dilakukan oleh Dura (2017:64-70). Penelitian ini menggunakan pendekatan kausal. Sampel ditentukan dengan menggunakan metode purposive sampling. Penelitian ini dilakukan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2013-2015. Dalam penelitian ini ditemukan hasil bahwa Profitabilitas, Likuiditas, Solvabilitas dan Ukuran Perusahaan berpengaruh terhadap Audit Report Lag.

Penelitian kedelapan dilakukan oleh Artaningrum, Budiarta dan Wirakusuma (2017:1079-1108). Objek penelitian ini adalah seluruh perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2009-2013, Data menggunakan data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kelima variabel tersebut yaitu Profitabilitas, Solvabilitas, Likuiditas, Ukuran Perusahaan dan Pergantian Manajemen berpengaruh terhadap Audit Report Lag.

Penelitian kesembilan dilakukan oleh Lestari dan Latrini (2018:422-450). Penelitian ini dilakukan pada perusahaan manufaktur

yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia periode 2014-2016 dengan mengakses website resmi BEI www.idx.co.id. Penelitian ini mengambil seluruh populasi perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI periode 2012-2016 yang berjumlah 144 perusahaan. Sampel penelitian ditentukan dengan metode purposive sampling, sehingga diperoleh 63 perusahaan sebagai sampel. Jenis data penelitian ini adalah data kuantitatif serta sumber data adalah data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hanya Ukuran Perusahaan Klient yang berpengaruh terhadap Audit Delay, sedangkan variabel Fee Audit, Ukuran KAP dan Opini Auditor tidak menunjukkan pengaruhnya terhadap Audit Delay.

Penelitian kesepuluh yang dilakukan oleh International Business Research Vol. 1, No. 4 October 2008. www.ccsenet.org/journal.html. Audit keterlambatan Emiten : A Case of Maalaysia Ayoib Che-Ahmad. College of Business, Universiti Utara Malaysia. 06010 UUM Sintok, kedah, Malaysia. Shamharir Abidin. College of Business, University Utara Malaysia. 06010 UUM Sintok, kedah, Malaysia. Penelitian ini telah berusaha untuk menjelaskan faktor-faktor penentu audit delay dilingkungan Malaysia. Hasilnya luas konsisten dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan di negara-negara Barat. Ukuran, kompleksitas, kepemilikan saham direksi, ukuran auditor, opini audit dan profitabilitas perusahaan adalah penentu utama audit delay. Sama hasilnya juga ditemukan di non-perbankan dan sektor keuangan. Namun, kepemilikan saham hanya direksi ditemukan secara signifikan terkait dengan audit delay pada tingkat signifikan satu-persen sementara kompleksitas klien dan opini audit yang signifikan pada tingkat sepuluh persen. Perbedaan kerangka peraturan yang ditawarkan sebagai salah satu kemungkinan penyebab untuk perbedaan. Ada kemungkinan keterbatasan desain yang dijelaskan dalam penelitian ini, terutama mengenai pengukuran direksi bunga. Kepentingan direksi diungkapkan dalam laporan direktur. Namun, data mungkin tidak mencerminkan persentase akurat kepemilikan baik sebagai kepemilikan saham langsung dan tidak langsung termasuk dalam jumlah kepentingan dalam banyak kasus. Selanjutnya, kehadiran

pemegang saham institusional dan penggunaan perusahaan calon untuk mendaftarkan kepemilikan saham mungkin juga menambahkan suara untuk analisis. Namun, amandemen baru untuk Companies Act 1965 memberikan definisi yang jelas tentang apa yang merupakan “bunga (s) saham” (Cheong, 1990). Hukuman substansial diberlakukan untuk pengungkapan keuangan menjaga rahasia atau tidak akurat mungkin untuk meminimalkan ketidakakuratan data.

Penelitian kesebelas dilakukan oleh Khalatbari et al (2013) berjudul “Studying The Relationship of Earnings Quality and Audit Delay in Accepted Companies in Tehran Securities”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh faktor-faktor yang mempengaruhi Earnings Quality and Audit Delay. penelitian ini menggunakan pengujian kuantitatif. Hasil tersebut menunjukkan bahwa hasil ukuran perusahaan, ukuran auditor, opini auditor berpengaruh terhadap audit delay sedangkan earning quality tidak berpengaruh terhadap audit delay.

Penelitian ke duabelas oleh Tino Viko dan Marko Cular (2014). Penelitian ini berjudul “Finding Determinants Of Audit Delay BY Pooled OLS Regression Analysis”. Variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis KAP, opini audit, profitabilitas, leverage, persediaan dan piutang terhadap total aset, nilai absolut dari total akrual, ukuran perusahaan dan komite audit serta audit delay sebagai variabel dependen. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa keberadaan komite audit, profitabilitas, leverage, secara statistik berpengaruh signifikan terhadap audit delay di Kroasia.

2.2. Landasan Teori

2.2.1. Pengertian Laporan Keuangan

Pengertian laporan keuangan menurut Standar Akuntansi Keuangan (SAK) (2015) yaitu “Laporan keuangan merupakan bagian dari proses pelaporan keuangan. Laporan keuangan yang lengkap biasanya meliputi neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan posisi keuangan (yang dapat disajikan dalam berbagai cara, sebagai contoh, sebagai laporan arus kas atau laporan arus dana), catatan dan

laporan lain serta materi penjelasan yang merupakan bagian integral dari laporan keuangan. Di samping itu juga termasuk skedul dan informasi tambahan yang berkaitan dengan laporan tersebut, misalnya informasi keuangan segmen industri dan geografis serta pengungkapan pengaruh perubahan harga. Akan tetapi, pembahasan umum oleh manajemen dan item serupa yang dapat termasuk dalam laporan keuangan atau laporan tahunan”.

2.2.2. Tujuan Laporan Keuangan

Tujuan laporan keuangan menurut SAK (2015:3) adalah menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja serta perubahan posisi keuangan suatu entitas atau perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah besar pengguna dalam pengambilan keputusan ekonomik. Laporan keuangan yang disusun untuk tujuan ini memenuhi kebutuhan bersama sebagian besar pengguna. Namun demikian, laporan keuangan tidak menyediakan semua informasi yang mungkin dibutuhkan pengguna dalam pengambilan keputusan ekonomik karena secara umum menggambarkan pengaruh keuangan dari kejadian di masa lalu, dan tidak diwajibkan untuk menyediakan informasi nonkeuangan.

2.2.3. Karakteristik Laporan Keuangan

Karakteristik kualitatif merupakan ciri khas yang membuat informasi dalam laporan keuangan berguna bagi pengguna. Standar Akuntansi Keuangan (SAK) menjelaskan empat karakteristik kualitatif pokok dalam laporan keuangan (2015:5-7), antara lain :

1) Dapat dipahami

Kualitas penting informasi yang ditampung dalam laporan keuangan adalah kemudahannya untuk segera dapat dipahami oleh pengguna. Untuk mencapai maksud ini, pengguna diasumsikan memiliki pengetahuan yang memadai tentang aktivitas ekonomi dan bisnis, akuntansi, serta kemauan untuk mempelajari informasi dengan ketekunan yang wajar. Akan tetapi, informasi kompleks yang seharusnya dimasukkan dalam laporan keuangan tidak dapat dikeluarkan hanya atas dasar pertimbangan bahwa informasi tersebut terlalu sulit untuk dapat dipahami oleh pengguna tertentu.

2) Relevan

Agar bermanfaat, informasi harus relevan untuk memenuhi kebutuhan pengguna dalam proses pengambilan keputusan. Informasi memiliki kualitas relevan jika dapat mempengaruhi keputusan ekonomi pengguna dengan membantu mereka untuk mengevaluasi peristiwa masa lalu, masa kini atau masa depan, menegaskan, atau mengoreksi, hasil evaluasi pengguna dimasa lalu.

3) Keandalan

Agar bermanfaat, informasi juga harus andal (reliable). Informasi memiliki kualitas andal jika bebas dari pengertian yang menyesatkan, kesalahan material, dan dapat diandalkan penggunaannya sebagai penyajian yang tulus atau jujur (faithful representation) dari yang seharusnya disajikan atau yang secara wajar diharapkan dapat disajikan.

4) Dapat dibandingkan

Pengguna harus dapat memperbandingkan laporan keuangan entitas antar periode untuk mengidentifikasi kecenderungan (trend) posisi dan kinerja keuangan. Pengguna juga harus dapat memperbandingkan laporan keuangan antar entitas untuk mengevaluasi posisi keuangan, kinerja serta perubahan posisi keuangan secara relatif. Oleh karena itu, pengukuran dan penyajian dampak keuangan dari transaksi dan peristiwa lain yang serupa harus dilakukan secara konsisten untuk entitas tersebut, antar periode yang sama dan untuk entitas yang berbeda.

Dengan demikian pengguna dapat memperoleh informasi tentang kebijakan akuntansi yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan dan perubahan kebijakan serta pengaruh perubahan tersebut. Ketaatan pada standar akuntansi keuangan, termasuk pengungkapan kebijakan akuntansi yang digunakan oleh perusahaan, membantu pencapaian karakteristik ini. Dari paparan di atas dapat disimpulkan bahwa laporan keuangan yang berkualitas adalah laporan dengan kandungan informasi dapat dipahami, relevan, dapat diandalkan, dan mempunyai daya banding. Karakteristik relevan di sini berarti laporan tersebut mampu mendeskripsikan kondisi keuangan perusahaan secara tepat waktu.

2.2.4. Jenis-jenis Laporan Keuangan

Komponen laporan keuangan menurut PSAK No. 1 tahun 2015 terdiri dari :

- 1) Laporan posisi keuangan pada akhir periode;
- 2) Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain selama periode;
- 3) Laporan perubahan ekuitas selama periode;
- 4) Laporan arus kas selama periode;
- 5) Catatan atas laporan keuangan, berisi ringkasan kebijakan akuntansi yang signifikan dan informasi penjelasan lain;
- 6) Informasi komparatif mengenai periode terdekat sebelumnya sebagaimana ditentukan dalam paragraf 38 dan 38A; dan
- 7) Laporan posisi keuangan pada awal periode terdekat sebelumnya ketika entitas menerapkan suatu kebijakan akuntansi secara retrospektif atau membuat penyajian kembali pos-pos laporan keuangannya sesuai dengan paragraf 40A-40D.

2.2.5. Auditing

2.2.5.1. Definisi Audit

Menurut Arens, et al (2015:2) Auditing adalah pengumpulan dan evaluasi bukti tentang informasi untuk menentukan dan melaporkan derajat kesesuaian antara informasi itu dan kriteria yang telah ditetapkan. Audit harus dilakukan oleh orang yang kompeten dan independen.

Definisi Auditing menurut Tuanakotta (2015:4) adalah “Auditing adalah suatu pemeriksaan yang dilakukan secara kritis dan sistematis oleh pihak yang independen, terhadap laporan keuangan yang telah disusun oleh manajemen, beserta catatan-catatan pembukuan dan bukti-bukti pendukungnya, dengan tujuan untuk dapat memberikan pendapat mengenai kewajaran laporan keuangan tersebut.”

Menurut Standar Profesional Akuntan Publik (2016) “Auditing adalah proses pengumpulan dan pengevaluasian bahan bukti tentang informasi yang dapat diukur mengenai suatu entitas ekonomi yang dilakukan seorang yang kompeten dan independen untuk dapat menentukan dan melaporkan kesesuaian informasi dimaksud dengan kriteria-kriteria yang telah ditetapkan”.

Berdasarkan pada definisi diatas, maka dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan auditing merupakan proses sistematis yang dilakukan oleh pihak independen dan kompeten dalam mengumpulkan dan mengevaluasi bukti-bukti secara objektif yang berkaitan untuk menentukan apakah pernyataan pihak yang diaudit sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan dan kemudian mengkomunikasikan hasilnya kepada para pemakai informasi keuangan.

2.2.5.2. Tujuan Audit

Tujuan suatu audit adalah untuk meningkatkan tingkat keyakinan pengguna laporan keuangan yang dituju. Hal ini dicapai melalui pernyataan suatu opini oleh auditor tentang apakah laporan keuangan disusun, dalam semua hal yang material, sesuai dengan suatu kerangka pelaporan keuangan yang berlaku. Dalam hal kebanyakan kerangka bertujuan umum, opini tersebut adalah tentang apakah laporan keuangan disajikan secara wajar dalam semua hal yang material, sesuai dengan kerangka. Suatu audit yang dilaksanakan berdasarkan SA dan ketentuan etika yang relevan memungkinkan auditor untuk merumuskan opini. (SA 200.1 Ref: Para.A1)

2.2.5.3. Jenis-jenis Audit

Akuntan publik melakukan tiga jenis utama audit, antara lain (Arens, et.al., 2015:12) :

1. **Audit Operasional (Management Audit)**
Mengevaluasi efisiensi dan efektivitas setiap bagian dari prosedur dan metode operasi organisasi. Pada akhirnya audit operasiaonal, manajemen biasanya mengharapkan rekomendasi untuk memperbaiki operasi.
2. **Audit Ketaatan (Compliance Audit)**
Dilaksanakan untuk menentukan apakah pihak yang diaudit mengikuti prosedur, aturan atau ketentuan tertentu yang ditetpakan oleh otoritas yang lebih tinggi.
3. **Audit Laporan Keuangan (Financial Statement Audit)**
Dilakukan untuk menentukan apakah laporan keuangan (informasi yang diverifikasi) telah dinyatakan sesuai dengan kriteria tertentu. Biasanya kriteria yang berlaku adalah standar akuntansi A.S atau Internasional, walaupun auditor mungkin saja melakukan audit atas laporan keuangan

yang disusun dengan menggunakan akuntansi dasar kas atau beberapa dasar lainnya yang cocok organisasi itu.

2.2.5.4. Tipe Audit

Menurut Mulyadi dalam buku Auditing (2017:28) tipe auditor dapat dibedakan menjadi tiga jenis, yaitu :

1. Auditor Pemerintah

Auditor pemerintah adalah auditor profesional yang bekerja di instansi pemerintah yang tugas pokoknya melakukan audit atas pusat pertanggung jawaban keuangan yang ditujukan kepada pemerintah. Meskipun terdapat banyak auditor yang bekerja di instansi pemerintah, namun umumnya yang disebut auditor pemerintah adalah auditor yang bekerja di Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK), serta instansi pajak.

2. Auditor Intern

Auditor intern adalah auditor yang bekerja dalam perusahaan (perusahaan Negara maupun swasta) yang tugas pokoknya adalah menentukan apakah kebijakan dan prosedur yang ditetapkan oleh manajemen puncak telah dipatuhi, menentukan baik atau tidaknya penjagaan terhadap kekayaan organisasi, menentukan efisiensi dan efektivitas prosedur kegiatan organisasi, serta menentukan keandalan informasi yang dihasilkan oleh berbagai bagian organisasi. Umumnya pemakai jasa auditor intern adalah Dewan Komisaris atau Direktur Utama Perusahaan.

3. Auditor Independen atau Akuntan Publik

Auditor independen adalah auditor profesional yang menyediakan jasanya kepada masyarakat umum, terutama dalam bidang audit atas laporan keuangan yang dibuat kliennya. Audit tersebut terutama ditujukan untuk para pemakai informasi keuangan, seperti: kreditur, investor, calon kreditur, calon investor, dan instansi pemerintah (terutama instansi pajak).

2.2.5.5. Standar Audit

Institusi Akuntansi Publik Indonesia (IAPI) merupakan Asosiasi Profesi Akuntansi Publik yang telah ditetapkan oleh Kementerian Keuangan yang mempunyai kewenangan salah satunya yaitu menyusun dan menetapkan Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP). Menurut Standar Profesi Akuntan Publik (SPAP) standar auditing adalah panduan audit atas laporan keuangan historis. Standar Auditing berkaitan dengan tidak hanya kualitas profesional auditor namun juga berkaitan dengan pertimbangan yang digunakan dalam pelaksanaan auditnya dan dalam laporannya.

Standar audit berbeda dengan prosedur audit. Prosedur berkaitan dengan tindakan yang harus dilaksanakan, sedangkan standar berkenaan dengan kriteria atau ukuran mutu kinerja tindakan tersebut dan berkaitan dengan tujuan yang hendak dicapai melalui penggunaan prosedur tersebut (PSA No. 1, Standar Audit Seksi 150). Dengan demikian standar audit mencakup mutu profesional auditor independen dan pertimbangan yang digunakan dalam pelaksanaan audit dan penyusunan laporan audit.

Standar audit telah ditetapkan dan disahkan oleh Ikatan Akuntansi Indonesia pada tahun 2001 terdiri dari sepuluh standar yang dikelompokkan menjadi tiga besar yaitu :

1. Standar Umum
 - a. Audit harus dilaksanakan oleh seorang atau lebih yang memiliki keahlian dan pelatihan teknis yang cukup sebagai auditor.
 - b. Dalam semua hal yang berhubungan dengan perikatan, independensi dalam sikap mental harus dipertahankan oleh auditor.
 - c. Dalam pelaksanaan audit dan penyusunan laporannya, auditor wajib menggunakan kemahiran profesionalnya dengan cermat dan sesama.
2. Standar Pekerjaan Lapangan
 - a. Pekerjaan harus direncanakan sebaik-baiknya dan jika digunakan asisten harus disupervisi dengan semestinya.
 - b. Pemahaman memadai atas pengendalian intern harus diperoleh untuk merencanakan audit dan menentukan sifat dan lingkup pengujian yang akan dilakukan.

- c. Bukti audit kompeten yang cukup harus diperoleh melalui inspeksi, pengamatan, permintaan keterangan dan konfirmasi sebagai dasar memadai untuk menyatakan pendapat atas laporan yang diaudit.
3. Standar Pelaporan
- a. Laporan auditor harus menyatakan apakah laporan keuangan telah disusun sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.
- b. Laporan auditor harus menunjukkan, jika ada ketidak konsistenan penerapan prinsip akuntansi dalam penyusunan laporan keuangan periode berjalan dibandingkan dengan penerapan prinsip akuntansi tersebut dalam periode sebelumnya.
- c. Pengungkapan informatif dalam laporan keuangan harus dipandang memadai, kecuali dinyatakan lain dalam laporan auditor.
- d. Laporan auditor harus memuat suatu pernyataan pendapat mengenai laporan keuangan secara keseluruhan atau suatu asersi bahwa pernyataan demikian tidak dapat diberikan.

2.2.5.6. Proses Audit

Menurut Arens, et.al., (2015:503) ada 4 (empat) fase yang harus dilakukan auditor dalam keseluruhan proses audit :

1. Fase Pertama : Merencanakan dan Merancang Pendekatan Audit, dalam fase ini auditor harus melakukan hal-hal dibawah ini :
 - Menerima klien dan melaksanakan perencanaan awal
 - Memahami bisnis dan industri klien
 - Menilai risiko bisnis klien
 - Melaksanakan prosedur analitis pendahuluan
 - Menetapkan materialitas dan menilai risiko audit yang dapat diterima serta risiko intern
 - Memahami pengendalian internal dan menilai risiko pengendalian
 - Mengumpulkan informasi untuk menilai risiko kecurangan
 - Mengembangkan strategi audit dan program audit secara keseluruhan

2. Fase Kedua : Melaksanakan Pengujian Pengendalian dan Pengujian Substantif atas transaksi. Dalam fase ini auditor harus melakukan hal-hal dibawah ini :
 - Merencanakan untuk mengurangi penilaian tingkat risiko pengendalian.
 - Melaksanakan Pengujian pengendalian, bila merencanakan untuk mengurangi penilaian tingkat resiko pengendalian
 - Melaksanakan pengujian substantif atas transaksi, bila tidak merencanakan untuk mengurangi penilaian tingkat resiko pengendalian
 - Menilai kemungkinan salah saji dalam laporan keuangan
3. Fase ketiga : Melaksanakan Prosedur Analitis dan Pengujian Rincian Saldo. Dalam fase ini auditor harus melakukan hal-hal dibawah ini :
 - Mengklasifikasikan nilai atas kemungkinan salah saji dalam laporan keuangan (Rendah:Sedang:Tinggi atau tidak diketahui)
 - Melaksanakan prosedur analitis
 - Melaksanakan pengujian atas pos-pos yang penting
 - Melaksanakan pengujian rincian saldo tambahan
4. Fase Keempat : Menyelesaikan Audit dan Mengeluarkan Laporan Audit. Dalam fase ini auditor harus melakukan hal-hal dibawah ini :
 - Melaksanakan pengujian tambahan atas penyajian dan pengungkapan
 - Mengumpulkan bukti akhir
 - Mengevaluasi hasil
 - Mengeluarkan laporan audit
 - Mengomunikasikan kepada komite audit dan manajemen

2.2.6. Laporan Audit

Menurut Mulyadi (2017:12) laporan audit merupakan media yang dipakai oleh auditor dalam berkomunikasi dengan masyarakat lingkungannya. Dalam laporan tersebut auditor menyatakan pendapatnya mengenai kewajaran laporan

keuangan auditan. Pendapat auditor tersebut disajikan dalam suatu laporan tertulis yang umumnya berupa laporan audit baru. Laporan audit baku terdiri dari tiga paragraph: paragraph pengantar (introductory paragraph), paragraph lingkup (scope paragraph), dan paragraph pendapat (opinion paragraph).

Auditor sebagai pihak yang independen didalam pemeriksaan laporan keuangan suatu perusahaan, yang nantinya akan memberikan pendapat atas kewajaran laporan keuangan yang di auditnya. Ada lima tipe pendapat laporan audit yang diterbitkan oleh auditor (Mulyadi, 2017) :

Ada 5 tipe pokok laporan audit yang diterbitkan oleh auditor :

1. Pendapat wajar tanpa pengecualian (*Unqualified Opinion*)

Pendapat wajar tanpa pengecualian diberikan oleh auditor jika tidak terjadi pembatasan dalam lingkup audit dan tidak terdapat pengecualian yang signifikan mengenai kewajaran dan penerapan prinsip akuntansi berterima umum dalam menyusun laporan keuangan, konsistensi penerapan prinsip akuntansi berterima umum tersebut, serta pengungkapan memadai dalam laporan keuangan.

Laporan audit yang berisi pendapat wajar tanpa pengecualian adalah laporan yang paling dibutuhkan oleh semua pihak, baik oleh klient, pemakai informasi keuangan, maupun oleh auditor.

Kata wajar dalam paragraph pendapat mempunyai makna : (1) bebas dari keragu-raguan dan ketidakjujuran, (2) lengkap informasinya. Pengertian wajar ini tidak hanya terbatas pada jumlah-jumlah rupiah dan pengungkapan yang tercantum dalam laporan keuangan, namun meliputi pula ketepatan penggolongan informasi, seperti penggolongan aktiva atau utang ke dalam kelompok lancar dan tidak lancar, biaya usaha dan biaya diluar usaha.

Laporan keuangan dianggap menyajikan secara wajar posisi keuangan dan hasil usaha suatu organisasi, sesuai dengan prinsip akuntansi berterima umum, jika memenuhi kondisi berikut ini :

- a. Prinsip akuntansi berterima umum digunakan untuk menyusun laporan keuangan
- b. Perubahan penerapan prinsip akuntansi berterima umum dari period ke period telah cukup dijelaskan

- c. Informasi dalam catatan-catatan yang mendukungnya telah digambarkan dan dijelaskan dengan cukup dalam laporan keuangan, sesuai dengan prinsip akuntansi berterima umum.

Jika laporan keuangan menyajikan secara wajar posisi keuangan dan hasil usaha perusahaan klien dan tidak terdapat hal-hal yang memerlukan bahasa penjelasan, auditor dapat menerbitkan laporan audit baku.

2. Pendapat Wajar Tanpa Pengecualian dengan Bahasa Penjelas (*Unqualified Opinion Report with Explanatory Language*)

Jika terdapat hal-hal yang memerlukan bahasa penjelasan, namun laporan keuangan tetap menyajikan secara wajar posisi keuangan dan hasil usaha perusahaan klien, auditor dapat menerbitkan laporan audit baku ditambah dengan bahasa penjelasan.

3. Pendapat Wajar dengan Pengecualian (*Qualified Opinion*)

Jika auditor menjumpai kondisi-kondisi berikut ini, maka ia memberikan pendapat wajar dengan pengecualian dalam laporan audit.

1. Lingkup audit dibatasi oleh klien
2. Auditor tidak dapat melaksanakan prosedur audit penting atau tidak dapat memperoleh informasi penting karena kondisi-kondisi yang berada di luar kekuasaan klien maupun auditor.
3. Laporan keuangan tidak disusun sesuai dengan prinsip akuntansi berterima umum.
4. Prinsip akuntansi berterima umum yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan tidak diterapkan secara konsisten.

Pendapat wajar dengan pengecualian diberikan oleh auditor jika dalam auditnya auditor menemukan salah satu dari kondisi 1 sampai 4 seperti tersebut diatas. Pendapat ini hanya diberikan jika secara keseluruhan laporan keuangan yang disajikan oleh klien adalah wajar. Dalam pendapat ini auditor menyatakan bahwa laporan keuangan yang disajikan oleh klien adalah wajar, tetapi ada

beberapa unsur yang di kecualikan, yang pengecualiannya tidak mempengaruhi kewajaran laporan keuangan secara keseluruhan.

4. Pendapat Tidak Wajar (*Adverse Opinion*)

Pendapat tidak wajar merupakan kebalikan dari pendapat wajar tanpa pengecualian. Akuntan memberikan pendapat tidak wajar jika laporan keuangan klien tidak disusun berdasarkan prinsip akuntansi berterima umum sehingga tidak menyajikan secara wajar posisi keuangan, hasil usaha perusahaan ekuitas, dan arus kas perusahaan klien. Auditor memberikan pendapat tidak wajar jika ia tidak dibatasi lingkup auditnya, sehingga ia dapat mengumpulkan bukti kompeten yang cukup untuk mendukung pendapatnya. Jika laporan keuangan diberi pendapat tidak wajar oleh auditor, maka informasi yang disajikan oleh klien dalam laporan keuangan sama sekali tidak dapat dipercaya, sehingga tidak dapat dipakai oleh pemakai informasi keuangan untuk pengambilan keputusan.

5. Pernyataan tidak memberikan pendapat (*Disclaimer of Opinion*)

Jika auditor tidak menyatakan pendapat atas laporan keuangan auditan, maka laporan audit ini disebut dengan laporan tanpa pendapat (no opinion report) kondisi yang menyebabkan auditor menyatakan tidak memberikan pendapat adalah:

- a. Pembatasan yang luar biasa sifatnya terhadap lingkungan audit.
- b. Auditor tidak independen dalam hubungannya dengan klien, maksudnya memiliki kepentingan yang berbeda antara pihak internal perusahaan sebagai pihak yang mengeluarkan laporan keuangan dan pihak eksternal sebagai pihak yang menggunakan laporan keuangan perusahaan untuk tujuan tertentu.

Perbedaan antara pernyataan tidak memberikan pendapat dengan pendapat tidak wajar (*adverse opinion*) adalah: pendapat tidak wajar ini diberikan dalam keadaan auditor mengetahui adanya kewajaran laporan keuangan klien, sedangkan auditor menyatakan tidak memberikan pendapat (*no opinion*) karena ia tidak cukup memperoleh bukti mengenai kewajaran laporan keuangan auditan atau karena ia tidak independen dalam hubungannya dengan klien.

2.2.7. Audit Delay

Audit Delay adalah interval waktu antara tahun tutup buku laporan keuangan hingga opini pada laporan keuangan audit ditandatangani (Ibrahim dan Suryaningsih, 2016). Dalam penelitian Amani (2016), *audit delay* merupakan perbedaan waktu antara tanggal laporan keuangan dengan tanggal opini audit dalam laporan keuangan menunjukkan tentang lamanya waktu penyelesaian audit.

Ikatan Akuntan Indonesia menyebutkan jika terdapat penundaan yang tidak semestinya dalam pelaporan, maka informasi yang dihasilkan akan kehilangan relevansinya. Hal ini menjelaskan pentingnya relevansi yang tidak mungkin didapatkan tanpa adanya ketepatan waktu. Berdasarkan pengertian-pengertian diatas, maka dapat disimpulkan bahwa *audit delay* adalah lamanya atau rentang waktu yang dibutuhkan seorang auditor menyelesaikan tugas audit atas laporan keuangan yang dapat dihitung dari tanggal tutup buku perusahaan yaitu 31 Desember sampai dengan tanggal laporan audit diterbitkan.

Banyaknya transaksi yang harus diaudit, kerumitan dari transaksi, dan pengendalian internal yang kurang baik, sehingga menyebabkan *audit delay* semakin meningkat. Semakin lama auditor menyelesaikan pekerjaan auditnya, maka semakin lama pula *audit delay*. Ini berarti jika *audit delay* semakin lama, maka semakin besar kemungkinan perusahaan terlambat menyampaikan laporan keuangan ke Bapepam dan para pengguna lainnya.

Dalam Eksandy (2017), yaitu lamanya waktu penyelesaian audit yang diukur dari tanggal diterbitkannya laporan audit. Variabel ini diukur secara kuantitatif dalam jumlah hari.

$$\text{Audit Delay} = \text{Tanggal Laporan Audit} - \text{Tanggal Laporan Keuangan}$$

Otorisasi Jasa Keuangan (OJK) mengeluarkan peraturan baru ditahun 2016, yaitu Peraturan Otorisasi Jasa Keuangan Nomor 20/POJK.04/201 tentang Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik dan menyatakan bahwa :

1. Emiten atau Perusahaan Publik wajib menyampaikan Laporan Tahunan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat pada akhir bulan keempat setelah tahun buku berakhir.
2. Dalam hal Laporan Tahunan telah tersedia bagi pemegang saham sebelum jangka waktu penyampaian Laporan Tahunan berakhir

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Laporan Tahunan wajib disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan pada tanggal yang sama dengan tersedianya Laporan Tahunan bagi pemegang saham.

3. Dalam hal Emiten atau Perusahaan Publik memperoleh pernyataan efektif untuk pertama kali dalam periode setelah tahun buku berakhir sampai dengan batas waktu penyampaian Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Emiten atau Perusahaan Publik wajib menyampaikan laporan tahunan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat pada tanggal pemanggilan RUPS tahunan (jika ada).
4. Laporan tahunan yang disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat tidak mengikuti ketentuan bentuk dan isi Laporan Tahunan.

Bagi Emiten atau Perusahaan Publik yang Efeknya tercatat pada Bursa Efek di Indonesia dan Bursa Efek di negara lain, berlaku ketentuan sebagai berikut:

- a. batas waktu penyampaian Laporan Tahunan wajib sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 7;
- b. penyampaian Laporan Tahunan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan otoritas pasar modal di negara lain dilakukan pada tanggal yang sama; dan
- c. Laporan Tahunan yang disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan otoritas pasar modal di negara lain wajib memuat informasi yang sama dan paling sedikit memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

Apabila perusahaan tidak memenuhi peraturan tersebut maka akan dikenakan sanksi administratif. Sesuai Peraturan Pemerintah No.45 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal Bab XII pasal 63 huruf e bahwa bagi setiap perusahaan publik yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) akan dikenakan sanksi denda Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) atas setiap hari keterlambatan penyampaian laporan keuangan dengan jumlah keseluruhan denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). Selain sanksi

administratif yang diberikan oleh Bapepam-LK, perusahaan go-public yang terlambat menyampaikan laporan keuangan juga akan dikenai sanksi dari Bursa Efek Indonesia (BEI). Berdasarkan keputusan direksi PT. Bursa Efek Indonesia Jakarta Nomor 306/BEJ/-7-2004 tentang Peraturan Nomor I-H tentang sanksi bagi perusahaan terdaftar yang terlambat menyampaikan laporan keuangan. Sanksi yang diberikan yaitu peringatan tertulis I, peringatan tertulis I dan denda Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), hingga dilakukannya suspensi.

Di Indonesia masih banyak perusahaan yang tidak mematuhi peraturan Bursa Efek Indonesia (BEI) mengenai penyampaian laporan keuangan secara berkala yang mengatur bahwa perusahaan yang terdaftar di BEI harus menyampaikan laporan keuangan tahunan yang lazim selambat-lambatnya pada akhir bulan ke tiga setelah tanggal laporan keuangan tahunan.

2.2.8. Faktor-faktor yang mempengaruhi Audit Delay

1) Profitabilitas

Profitabilitas adalah hasil atau laba bersih dari berbagai kebijakan dan keputusan yang diambil oleh manajemen perusahaan, serta dapat memberi jawaban akhir tentang tingkat efektifitas pengelolaan perusahaan. Sehingga perusahaan-perusahaan yang ada di BEI jika memiliki profitabilitas yang tinggi akan mencoba menyelesaikan laporan keuangan dengan tepat waktu agar para investor dapat melihat secara transparan menilai laporan keuangan perusahaan tersebut (Artaningrum dkk, 2017).

Profitabilitas sebagai faktor yang juga mempengaruhi *audit delay*. Jadi, Profitabilitas merupakan indikator keberhasilan kinerja perusahaan untuk menghasilkan laba. Profitabilitas dapat dilihat dari tingkat rasio Return On Asset (ROA) yang menunjukkan kemampuan perusahaan dalam menggunakan aset untuk menghasilkan laba bagi perusahaan tersebut. Tingkat keuntungan digunakan sebagai salah satu cara untuk menilai keberhasilan efektivitas perusahaan. Return On Assets (ROA) merupakan salah satu rasio profitabilitas. Rasio ini menunjukkan kemampuan dari modal yang diinvestasikan dari keseluruhan aktiva untuk menghasilkan keuntungan. Semakin tinggi rasio ini

semakin baik. Yang menunjukkan semakin optimal penggunaan aset-asetnya dalam menghasilkan keuntungan.

Untuk menghitung tingkat profitabilitas perusahaan, dapat diukur dengan rumus sebagai berikut :

$$\text{ROA} = \frac{\text{Laba Bersih}}{\text{Total Aset}} \times 100 \%$$

2) Solvabilitas

Dalam penelitian Malik dan Suryaningsih (2016) menyatakan bahwa Solvabilitas atau *Leverage* merupakan kemampuan perusahaan untuk memenuhi segala kewajiban asset dan debt to equity. Menurut Kasmir (2015:151) Rasio Solvabilitas atau *leverage* merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur sejauh mana aktiva perusahaan dibiayai oleh utang. Artinya berapa besar beban utang yang ditanggung perusahaan dibandingkan dengan aktivanya.

Rasio solvabilitas atau rasio *leverage* merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur sejauh mana aset perusahaan dibiayai dengan utang. Dengan kata lain, rasio solvabilitas merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur seberapa besar utang yang ditanggung perusahaan dalam rangka pemenuhan aset. Dalam arti luas, rasio solvabilitas digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam memenuhi seluruh kewajibannya, baik kewajiban jangka pendek maupun kewajiban jangka panjang (Hery 2017:162).

Menurut Hery (2017:163) rasio solvabilitas memiliki beberapa pendekatan sebagai berikut :

- a. Pendekatan Neraca, yaitu mengukur rasio solvabilitas dengan menggunakan pos-pos yang ada di neraca. Pendekatan ini menghasilkan rasio solvabilitas yang terdiri atas rasio hutang terhadap aset, rasio hutang terhadap ekuitas, rasio hutang jangka panjang terhadap ekuitas.
- b. Pendekatan laporan laba-rugi, yaitu mengukur rasio solvabilitas dengan menggunakan pos-pos yang ada dalam laporan laba-rugi. Contoh rasio

solvabilitas berdasarkan pendekatan ini adalah rasio laba sebelum bunga dan pajak terhadap beban bunga.

- c. Pendekatan laporan laba-rugi dan neraca, yaitu mengukur rasio solvabilitas dengan menggunakan pos-pos yang ada di dalam laporan laba-rugi maupun neraca. Contoh rasio solvabilitas berdasarkan pendekatan campuran ini adalah rasio laba operasional terhadap kewajiban.

Rasio solvabilitas memiliki beberapa implikasi, berikut penjelasannya menurut Hery (2017:163) :

- a. Kreditor memandang jumlah ekuitas debitor sebagai margin keamanan. Apabila jumlah modal perusahaan debitor kecil maka berarti bahwa kreditor akan menganggu risiko yang besar.
- b. Penguasaan atau pengendalian terhadap perusahaan akan tetap berada di tangan debitor (perusahaan itu sendiri) apabila sumber pendanaan berasal dari pinjaman atau hutang.
- c. Sumber pendanaan yang berasal dari penerbitan dan penjualan saham akan menimbulkan pengaruh atau bahkan kendali pemegang saham (investor) terhadap perusahaan. Ingat kembali bahwa saham menggambarkan kepemilikan investor atau perusahaan.
- d. Apabila perusahaan memperoleh penghasilan lebih dari dana yang dipinjamkan dibandingkan dengan bunga yang harus dibayarkan kreditor maka kelebihan tersebut akan memperbesar pengembalian bagi pemilik.

Hasil perhitungan rasio solvabilitas diperlukan sebagai dasar pertimbangan dalam memutuskan antara penggunaan dana dari pinjaman atau penggunaan dana dari modal sebagai alternatif sumber pembiayaan perusahaan. Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa perhitungan ini perlu dilakukan secara cermat mengingat bahwa masing-masing jenis pembiayaan tersebut memiliki beberapa kelebihan dan kekurangan. Sama halnya dengan rasio likuiditas, rasio solvabilitas juga diperlukan untuk kepentingan analisis kredit atau analisis risiko keuangan. Berikut adalah tujuan dan manfaat rasio solvabilitas secara keseluruhan menurut Hery (2017:164) :

- a. Untuk mengetahui posisi total kewajiban perusahaan kepada kreditor, khusus jika dibandingkan dengan jumlah aset atau modal yang dimiliki perusahaan.
- b. Untuk mengetahui posisi kewajiban jangka panjang perusahaan terhadap jumlah modal yang dimiliki perusahaan.
- c. Untuk menilai kemampuan aset perusahaan dalam memenuhi seluruh kewajiban termasuk kewajiban yang bersifat tetap, seperti pembayaran angsuran pokok pinjaman beserta bunganya secara berkala.
- d. Untuk menilai seberapa besar aset perusahaan yang dibiayai oleh hutang.
- e. Untuk menilai seberapa besar aset perusahaan yang dibiayai oleh modal.
- f. Untuk menilai seberapa besar pengaruh hutang terhadap pembiayaan aset perusahaan.
- g. Untuk menilai seberapa besar pengaruh modal terhadap pembiayaan aset perusahaan.
- h. Untuk mengukur berapa bagian dari setiap rupiah aset yang dijadikan sebagai jaminan hutang bagi kreditor.
- i. Untuk mengukur berapa bagian dari setiap rupiah aset yang dijadikan sebagai jaminan modal bagi pemilik atau pemegang saham
- j. Untuk mengukur berapa bagian dari setiap rupiah modal yang dijadikan sebagai jaminan hutang
- k. Untuk mengukur berapa bagian dari setiap rupiah modal yang dijadikan sebagai jaminan hutang jangka panjang.
- l. Untuk menilai sejauh mana atau berapa kali kemampuan perusahaan (yang diukur dari jumlah laba sebelum bunga dan pajak) dalam membayar bunga pinjaman
- m. Untuk menilai sejauh mana atau berapa kali kemampuan perusahaan (yang diukur dari jumlah laba operasional) dalam melunasi seluruh kewajiban.

Jenis-jenis rasio solvabilitas menurut Hery (2017:166) sebagai berikut :

- Rasio Hutang Terhadap Aset (*Debt to Asset Ratio*)
Rasio ini merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur perbandingan antara total hutang dengan total asset. Dengan kata lain, rasio ini digunakan

untuk mengukur seberapa besar asset perusahaan dibiayai oleh hutang atau seberapa besar hutang perusahaan berpengaruh terhadap pembiayaan asset.

- Rasio Hutang Terhadap Modal (*Debt to Equity Ratio*)

Rasio ini merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur besarnya proporsi hutang terhadap modal. Rasio ini dihitung sebagai hasil bagi antara total hutang dengan modal. Rasio ini digunakan untuk mengetahui besarnya perbandingan antara jumlah dana yang disediakan oleh kreditor dengan jumlah dana yang berasal pemilik perusahaan. Dengan kata lain, rasio ini berfungsi untuk mengetahui berapa bagian dari setiap rupiah modal yang dijadikan sebagai jaminan hutang.

- Rasio Hutang Jangka Panjang Terhadap Modal (*Long term Debt to Equity Ratio*)

Rasio ini merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur besarnya proporsi hutang jangka panjang terhadap modal. Rasio ini digunakan untuk mengetahui besarnya perbandingan antara jumlah dana yang disediakan oleh kreditor jangka panjang dengan jumlah dana yang berasal dari pemilik perusahaan. Dengan kata lain, rasio hutang jangka panjang terhadap modal merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur berapa bagian dari setiap rupiah modal yang dijadikan sebagai jaminan hutang jangka panjang. Rasio ini dihitung sebagai hasil bagi antara hutang jangka panjang dengan modal. Dalam penelitian ini yang menjadi tolak ukur Solvabilitas diukur dengan rasio hutang terhadap aset (*Debt to Asset Ratio*) yang membandingkan jumlah hutang (baik jangka pendek ataupun jangka panjang) dengan jumlah aktiva (total asset). Dari hasil pengukuran, apabila rasionya tinggi maka pendanaan dengan hutang semakin banyak sehingga semakin sulit bagi perusahaan untuk memperoleh tambahan pinjaman karena dikhawatirkan perusahaan tidak mampu menutupi utangnya dengan aktiva yang dimilikinya. Demikian pula apabila rasionya rendah maka semakin kecil perusahaan dibiayai dengan hutang, rasio solvabilitas dapat diukur dengan rumus sebagai berikut :

$$\text{DER} = \frac{\text{Total Utang}}{\text{Total Ekuitas}} \times 100 \%$$

3) Opini Auditor

Auditor merupakan seseorang yang independen dalam mengaudit laporan keuangan suatu perusahaan, yang nantinya akan memberikan pendapat atas kewajaran laporan keuangan yang telah diauditnya. Laporan audit adalah alat formal yang mengkomunikasikan kesimpulan tentang laporan keuangan audit perusahaan pada pihak-pihak yang berkepentingan.

Auditor sebagai pihak-pihak yang independen didalam pemeriksaan laporan keuangan suatu perusahaan, yang nantinya akan memberikan pendapat atas kewajaran laporan keuangan yang di auditnya. Ada lima tipe pendapat laporan keuangan yang diterbitkan oleh auditor (Mulyadi,2017):

Ada 5 tipe pokok laporan audit yang diterbitkan oleh auditor :

1. Pendapat wajar tanpa pengecualian (*Unqualified Opinion*)
2. Pendapat Wajar Tanpa Pengecualian dengan Bahasa Penjelas (*Unqualified Opinion Report with Explanatory Language*)
3. Pendapat Wajar dengan Pengecualian (*Qualified Opinion*)
4. Pendapat Tidak Wajar (*Adverse Opinion*)
5. Pernyataan tidak memberikan pendapat (*Disclaimer of Opinion*)

4) Ukuran KAP

Menurut Febrianty (2011) dalam Lestari dan Latrini (2018), mengartikan Kantor Akuntan Publik (KAP) sebagai lembaga yang memiliki ijin dari Menteri Keuangan sebagai wadah bagi Akuntan Publik untuk menjalankan pekerjaannya.

Dalam penelitian Lestari dan Latrini (2018):

“Ukuran KAP merupakan ukuran yang digunakan untuk menentukan besar kecilnya suatu Kantor Akuntan Publik. Ukuran Kantor Akuntan Publik dapat dikatakan besar jika KAP tersebut berafiliasi dengan Big 4, mempunyai cabang dan kliennya perusahaan-perusahaan besar serta mempunyai tenaga profesional di atas 25 orang. Sedangkan Ukuran Kantor Akuntan Publik dikatakan kecil jika tidak berafiliasi dengan Big 4, tidak mempunyai kantor cabang dan kliennya perusahaan kecil serta jumlah tenaga profesionalnya kurang dari 25 orang.”

Ukuran KAP merupakan Ukuran KAP merupakan besar kecilnya KAP dengan mengelompokkan KAP menjadi KAP Big Four dan non Big Four. Ukuran KAP menggunakan dummy variable , dimana perusahaan yang diaudit oleh KAP Big Four diberikan nilai 1, sedangkan perusahaan yang diaudit oleh KAP non Big Four.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa ukuran Kantor Akuntan Publik (KAP) adalah besar kecilnya Kantor Akuntan Publik yang digunakan suatu perusahaan untuk melakukan pemeriksaan terhadap laporan keuangan perusahaan. Jika dihubungkan keberadaannya KAP yang ada di Indonesia, maka ukuran KAP terbesar yakni KAP yang berafiliasi dengan KAP asing yang tergolong Big 4.

Dikutip dari situs pppk.kemenkeu.go.id (2015), bahwa pada tahun 2011 KAP yang berafiliasi dengan *the big four* membukukan pendapatan seluruh jasa yang diberikannya sebesar Rp 1,506 triliun, sementara pendapatan KAP *non big four* pada tahun 2011 sebesar Rp 793,387 miliar. Menurut Yuliana dan Aloysia (2004) KAP yang masuk *the big four* di Indonesia meliputi:

- a. KAP *Price Waterhouse Coopers* (PWC), yang bekerja sama dengan KAP Drs. Hadi Susanto dan rekan, Haryanto Sahari dan rekan
- b. KAP *Klynfeld Peat Marwick Goedelar* (KPMG), yang bekerja sama dengan KAP Siddharta dan Widjaja
- c. KAP *Ernst and Young* (EY), yang bekerja sama dengan KAP Prasetio, Sarwoko dan Sandjaja
- d. KAP *Deloitte Touche Tohmatsu* (Deloitte), yang bekerja sama dengan KAP Drs. Hans Tuanokata dan Mustofa, Osman Ramli Satrio dan rekan

Untuk mengukur ukuran KAP, peneliti mengelompokkan KAP menjadi KAP *the big four* dan KAP *non big four* yang kemudian diukur dengan variabel *dummy*. Dimana perusahaan yang diaudit oleh KAP *the big four* diberikan nilai 1, sedangkan perusahaan yang diaudit oleh KAP *non big four* diberikan nilai 0.

Kategori Ukuran Kantor Akuntan Publik

Menurut Arens et al. (2015:32), kategori ukuran Kantor Akuntan Publik (KAP) secara internasional adalah sebagai berikut:

1. Kantor Internasional Empat Besar. Keempat KAP terbesar di Amerika Serikat disebut kantor akuntan publik internasional “Big Four”. Keempat kantor ini memiliki cabang di seluruh Amerika Serikat dan seluruh dunia. Kantor “Big Four” mengaudit hampir semua perusahaan besar baik di Amerika Serikat maupun dunia serta banyak juga perusahaan yang lebih kecil juga.
2. Kantor Nasional. Tiga KAP di Amerika Serikat disebut kantor nasional, karena memiliki cabang di sebagian kota besar kota utama. Kantor nasional memberikan jasa yang sama seperti kantor “Big Four” dan bersaing secara langsung dengannya untuk mendapat klien. Setiap kantor nasional berafiliasi dengan kantor-kantor di Negara lain dan karenanya mempunyai kemampuan bertaraf internasional .
3. Kantor Regional dan Kantor Lokal yang Besar. Terdapat kurang dari 200 KAP yang memiliki staf profesional lebih dari 50 orang. Sebagian hanya memiliki satu kantor dan terutama melayani klien–klien dalam jangka yang tidak begitu jauh. KAP yang lainnya memiliki beberapa cabang di satu Negara bagian atau wilayah dan melayani klien dalam radius yang lebih jauh.
4. Kantor Lokal Kecil. Lebih dari 95 persen dari semua KAP mempunyai kurang dari 25 KAP tenaga profesional pada kantor yang hanya memiliki satu cabang, dan entitas nirlaba, meskipun beberapa memiliki satu atau dua klien dengan kepemilikan publik. Banyak kantor lokal kecil tidak melakukan audit dan terutama memberikan jasa akuntansi serta perpajakan bagi klien-kliennya.”

Sedangkan menurut Messier et al. (2014:41).

“Kantor akuntan publik sering dikategorikan berdasarkan ukuran. Kantor yang terbesar adalah kantor akuntan publik “Big 4”: Deloitte, Ernst & Young, KPMG, dan Pricewaterhouse Coopers.”

2.3. Hubungan antar Variabel Penelitian

Operasional variable merupakan penjelasan mengenai variabel-variabel yang diteliti secara lebih dalam. Penjelasan disini meliputi definisi, indicator

variable, dan pengukuran variable. Adapun variable tersebut dibedakan berdasarkan jenisnya yaitu :

2.3.1. Variabel Dependen (Y)

Variabel ini sering disebut sebagai variabel output, kriteria, konsekuen. Dalam Bahasa Indonesia sering disebut variabel terikat. Pengertian variabel dependen (terikat) menurut Sugiyono (2017:39) “Variabel yang dipengaruhi atau menjadi akibat, karena adanya variabel bebas”. Dalam penelitian ini variabel terikat yaitu *audit delay* yaitu lamanya hari sejak tanggal penutupan tahun buku hingga tanggal diterbitkannya laporan audit.

Audit delay adalah jangka waktu yang dibutuhkan oleh auditor independen untuk mengeluarkan pendapat atas laporan keuangan yang di audit, yang diukur berdasarkan lamanya hari yang dibutuhkan dari tanggal tahun buku hingga tanggal laporan keuangan auditan ke Bursa Efek Indonesia.

Keterlambatan dalam penyajian pelaporan keuangan dapat menyebabkan terlambatnya pada penerbitan laporan keuangan di bursa efek. Hal ini disebabkan adanya proses pelaksanaan audit atas laporan keuangan perusahaan *listing* di bursa efek oleh akuntan public yang terdaftar di Badan Pengawas Pasar Modal (BAPEPAM) yang sekarang diganti menjadi Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Karena laporan keuangan auditan yang didalamnya memuat informasi laba yang dihasilkan oleh perusahaan bersangkutan dijadikan sebagai salah satu dasar pengambilan keputusan untuk membeli atau menjual kepemilikan yang dimiliki investor. Artinya informasi laba dari laporan keuangan yang dipublikasikan menyebabkan kenaikan atau penurunan harga saham. Oleh karena itu, kebanyakan kasus dalam *audit delay* disebabkan oleh ketidaktepatan waktu dalam penyajian laporan keuangan.

Keterlambatan dalam penyelesaian laporan audit hingga ditandatangani laporan audit oleh auditor atau sering disebut *audit delay* dapat disebabkan banyak faktor. Faktor-faktor yang dimaksud pada penelitian ini yaitu ukuran perusahaan, profitabilitas perusahaan, solvabilitas perusahaan, opini auditor dan kualitas auditor.

2.3.2. Variabel Independen (X)

Variabel ini sering disebut sebagai variabel stimulus, predictor, antecedent. Dalam Bahasa Indonesia sering disebut variabel bebas. Pengertian variabel independen (bebas) menurut Sugiyono (2017:39) “Variabel bebas adalah merupakan variabel yang mempengaruhi atau menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel dependen (terikat). variabel bebas yang digunakan dalam penelitian ini antara lain:

1. Profitabilitas Perusahaan

Faktor pertama yang mungkin dapat mempengaruhi *audit delay* adalah profitabilitas. Profitabilitas adalah hasil atau laba bersih dari berbagai kebijakan dan keputusan yang diambil oleh manajemen perusahaan, serta dapat memberi jawaban akhir tentang tingkat efektifitas pengelolaan perusahaan. Sehingga perusahaan-perusahaan yang ada di BEI jika memiliki profitabilitas yang tinggi akan mencoba menyelesaikan laporan keuangan dengan tepat waktu agar para investor dapat melihat secara transparan menilai laporan keuangan perusahaan tersebut (Artaningrum dkk, 2017).

$$ROA = \frac{\text{Laba Bersih}}{\text{Total Aset}} \times 100\%$$

2. Solvabilitas Perusahaan

Dalam penelitian Ibrahim dan Suryaningsih (2016) menyatakan bahwa Solvabilitas atau *Leverage* merupakan kemampuan perusahaan untuk memenuhi segala kewajiban asset dan debt to equity. Dalam penelitian tersebut ditemukan bahwa *Leverage* atau solvabilitas tidak berpengaruh terhadap Audit Delay

$$DER = \frac{\text{Total Utang}}{\text{Total Ekuitas}} \times 100\%$$

3. Opini Auditor

Faktor opini audit merupakan yang juga dapat mempengaruhi *audit delay*. Opini audit adalah pendapat yang dikeluarkan auditor mengenai kewajaran laporan keuangan perusahaan, dalam semua hal material, yang didasarkan atas kesesuaian penyusunan laporan keuangan tersebut dengan prinsip akuntansi berlaku umum. Opini audit terdiri dari pendapat wajar tanpa pengecualian (*unqualified opinion*); pendapat wajar tanpa pengecualian dengan bahasa penjelasan (*unqualified opinion with explanatory language*), pendapat wajar dengan pengecualian (*qualified opinion*), pendapat tidak wajar (*adverse opinion*), dan pernyataan tidak memberikan pendapat (*disclaimer of opinion*). Hasil dari penelitian Malinda Dwi Apriliane (2015) dalam Amani (2016) menunjukkan bahwa opini audit berpengaruh signifikan terhadap *audit delay*. perusahaan yang menerima pendapat *qualified opinion* akan mengalami *audit delay* semakin lama, hal ini disebabkan karena proses pemberian audit akan melibatkan negosiasi dengan klien serta konsultasi dengan partner audit yang lebih senior. Berbeda dengan perusahaan yang menerima pendapat *unqualified opinion*, *audit delay* cenderung lebih pendek karena perusahaan tidak akan menunda publikasi laporan keuangan yang berisi berita baik (*good news*).

4. Ukuran KAP

Hubungan antara ukuran kantor akuntan publik dengan kualitas audit sebenarnya sudah sering menjadi topik sejumlah studi empiris, seperti DeAngelo (1981), Choi et al. (2010), Pratiwi (2010) dan Pardede (2010). Hasil penelitian Lestari dan Latrini (2018:422-450) menunjukkan bahwa kantor KAP Big Four membutuhkan waktu yang lebih singkat dalam menyelesaikan audit secara efisien dan memiliki fleksibilitas jadwal waktu yang lebih tinggi untuk menyelesaikan audit tepat pada waktunya disamping mereka memiliki sumber daya manusia yang lebih banyak serta memiliki pengalaman yang lebih banyak dari KAP lainnya. Disamping itu, KAP besar memperoleh insentif yang lebih tinggi untuk menyelesaikan pekerjaan auditnya dibandingkan KAP kecil. Oleh karena itu,

secara tidak langsung kantor akuntan publik Big 4, yang memiliki ukuran yang besar dianggap memiliki kualitas audit yang baik.

Dari penelitian di atas. Penelitian yang dilakukan di Indonesia ini menunjukkan bahwa ukuran KAP atau tipe KAP yang di lambangkan oleh Big 4 dan Non-Big 4 tidak mempunyai pengaruh dengan kualitas audit. Artinya KAP Big 4 belum tentu menghasilkan kualitas audit yang lebih baik daripada KAP Non-Big 4. Perbedaan hasil penelitian inilah yang menarik untuk diteliti lebih lanjut.

2.4. Pengembangan Hipotesis

Informasi yang relevan adalah informasi yang mempunyai predictable, feed back value, dan tepat waktu (Smith dan Skousen (1987), dalam Yulianti (2010). Ketepatan waktu mengimplikasikan bahwa laporan keuangan seharusnya disajikan pada suatu interval waktu, maksudnya untuk menjelaskan perubahan didalam perusahaan yang mungkin mempengaruhi pemakai informasi pada waktu membuat prediksi dan keputusan. Sedangkan ketepatan waktu pelaporan sendiri dipengaruhi oleh lamanya audit Hendrikson (2000), dalam Yulianti (2010).

Ketepatan waktu penyusunan atau pelaporan suatu laporan keuangan perusahaan bisa berpengaruh pada nilai laporan keuangan tersebut. Keterlambatan informasi akan menimbulkan reaksi negative dari pelaku pasar modal. Informasi laba yang dihasilkan perusahaan dijadikan sebagai salah satu dasar pengambilan keputusan untuk membeli atau menjual kepemilikan yang dimiliki oleh investor. Artinya, informasi yang dipublikasikan tersebut akan menyebabkan kenaikan atau penurunan harga saham.

Audit delay berpengaruh terhadap tingkat relevansi informasi dalam laporan keuangan dan pada akhirnya berdampak pula pada tingkat kepastian keputusan yang didasarkan pada informasi tersebut. Hal ini dikarenakan jangka waktu penyelesaian audit dapat mempengaruhi ketepatanwaktuan penyampaian informasi dalam laporan keuangan perusahaan. Panjang pendeknya jangka waktu tersebut dipengaruhi oleh berbagai factor, yang selanjutnya akan dibahas lebih mendalam.

Berdasarkan penelitian sebelumnya ada banyak faktor yang mempengaruhi *audit delay* tetapi berdasarkan pengkajian, penelitian kali ini akan menguji faktor yang mempengaruhi *audit delay* dengan variabel bebas yaitu profitabilitas, solvabilitas, opini auditor dan ukuran KAP.

Laba menunjukkan keberhasilan perusahaan dalam mengambil keuntungan. Sehingga dapat dikatakan bahwa laba merupakan berita baik. Dengan demikian perusahaan yang meraih laba cenderung akan lebih tepat waktu dalam pelaporan keuangannya dibandingkan dengan perusahaan yang mengalami kerugian. Penelitian yang sebelumnya dilakukan oleh Amani (2016), Ibrahim dan Suryaningsih (2016), Suparsada dan Putri (2017), Eksandi (2017), Dura (2017), serta Artaningrum, Budiarta dan Wirakusuma (2017) menyatakan bahwa profitabilitas memiliki pengaruh negatif terhadap terhadap *audit delay*. ini berarti bahwa perusahaan yang meraih laba tinggi akan tepat waktu dalam menyampaikan laporan keuangannya.

H1 : ada pengaruh profitabilitas terhadap *audit delay*

Dura (2017:64-70) dan Artaningrum, Budiarta dan Wirakusuma (2017) menyatakan hasil penelitiannya bahwa Solvabilitas memiliki pengaruh positif terhadap audit report lag. Hal ini terjadi karena solvabilitas menunjukkan bagaimana kemampuan suatu perusahaan dalam mengelola semua hutangnya baik hutang jangka panjang maupun hutang jangka pendek. Jika sebuah perusahaan tidak mampu dalam membayar hutang-hutangnya maka perusahaan tersebut tidak akan mampu dalam melaporkan laporan keuangannya secara tepat waktu karena auditor akan memerlukan kecermatan yang lebih dalam pengauditan sehingga akan membuat audit report lag akan lebih panjang.

Suad Husnan (2004:70) menjelaskan bahwa debt to equity ratio menunjukkan perbandingan antara hutang dengan modal sendiri. Semakin tinggi DER mencerminkan resiko perusahaan relative tinggi karena perusahaan memiliki kewajiban untuk membayar bunga hutang akibatnya para investor cenderung menghindari saham-saham yang memiliki nilai DER yang tinggi.

H2 : ada pengaruh solvabilitas terhadap *audit delay*

Selanjutnya Amani (2016) membuktikan bahwa audit delay yang lebih panjang dialami oleh perusahaan yang menerima pendapat selain unqualified opinion. Hal ini dikarenakan pendapat selain unqualified opinion dianggap sebagai bad news, maka auditor akan melibatkan negosiasi dengan klien, konsultasi dengan partner auditor yang lebih senior atau staff teknis, dan perluasan lingkup audit, sehingga audit delay semakin panjang. Lain halnya dengan perusahaan yang menerima pendapat tepat waktu karena merupakan berita baik. Dalam hal ini, opini audit yang baik (unqualified opinion) harus mengemukakan bahwa laporan keuangan telah diaudit sesuai dengan ketentuan Standar Akuntansi Keuangan dan tidak ada penyimpangan material yang dapat mempengaruhi keputusan.

H3 : ada pengaruh opini auditor terhadap *audit delay*

Elen P dan Anggraeni N. S (2012) menyatakan besarnya ukuran KAP dapat digunakan sebagai indikator bahwa jasa audit yang diberikan memiliki kualitas yang tinggi. KAP berukuran besar memiliki sistem yang canggih dan akurat serta auditor yang bekerja lebih banyak dan profesional. Hal itu biasa ditemukan pada KAP yang bekerjasama dengan KAPA yaitu The Big Four karena ada nama baik yang dipertaruhkan untuk menjaga kualitas KAP. Selvia E.R dan Bambang S (2015) KAPA The Big Four mampu mengambil sikap dan pendapat yang tepat dan sesuai dengan dengan standar yang berlaku. Hal itu dikarenakan auditor yang bekerja memiliki tingkat kompetensi dan kemampuan yang lebih tinggi daripada KAP lokal. Iman, Ahmed & Khan (2001), Sistya Rachmawati (2008) dalam Lestari dan Latrini (2018) yang menemukan bahwa ukuran KAP berpengaruh negatif terhadap audit delay. Hal ini menunjukkan bahwa kantor KAP Big Four membutuhkan waktu yang lebih singkat dalam menyelesaikan audit secara efisien dan memiliki fleksibilitas jadwal waktu yang lebih tinggi untuk menyelesaikan audit tepat pada waktunya disamping mereka memiliki sumber daya manusia yang lebih banyak serta memiliki pengalaman yang lebih banyak dari KAP lainnya.

H4 : ada pengaruh Ukuran KAP terhadap *audit delay*

2.5. Kerangka Konseptual Penelitian

Berdasarkan pengembangan hipotesis diatas, maka dapat di gambarkan dengan kerangka konseptual sebagai berikut :

Gambar 2.1 Kerangka Konseptual Penelitian

